

**PERAN FORUM LINTAS PELAKU KLASTER PARIWISATA  
CEPOGO SELO SAWANGAN DALAM PENGEMBANGAN  
KLASTER PARIWISATA SELO-SAWANGAN**

**TUGAS AKHIR**

Oleh :

**DANA ERVANO**

**L2D 005 354**



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2009**

## ABSTRAKSI

*Forum Lintas Pelaku Klaster Pariwisata Cepogo Selo Sawangan (FCSS) merupakan bentuk nyata upaya kerjasama antar daerah Kab. Boyolali dan Kabupaten dalam pengembangan kawasan wisata Lembah Merapi-Merbabu. FCSS telah mampu menggabungkan kekuatan-kekuatan, baik individu-individu maupun lembaga-lembaga yang berasal dari unsur para pelaku ekonomi (usaha) dan pemerintah, menjadi sebuah forum kumpulan para pelaku yang saling berdialog secara aktif, dan juga merupakan suatu kerangka yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama, dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi daerah di sektor pariwisata. Jaringan kerjasama yang dijalin oleh FCSS tidak hanya fokus pada unit-unit usaha tingkat lokal saja tetapi dikembangkan lebih luas melewati batas-batas administratif daerah lain yang didasarkan pada prinsip-prinsip kebersamaan.*

*Sebagai sebuah forum lintas pelaku, FCSS berupaya untuk memahami masalah lokal dan mencari jalan keluar dengan berdasarkan pada kearifan lokal pula. Oleh karena itu pendekatan partisipatif yang mengakomodir semua masukan dan pendapat, kemudian masukan-masukan tersebut dirumuskan menjadi sebuah kebijakan atau program kerja pengembangan klaster. Dengan melibatkan semua pelaku masyarakat yang menjadi ciri utama dalam pendekatan forum lintas pelaku FCSS, sejalan dengan itu adalah makin menguatnya tanggung jawab individu dan penguatan sosial kemasyarakatan. Melalui aktivitas dialog yang dilakukan bersama yang melibatkan banyaknya pelaku di daerah, FCSS diharapkan mampu memberi solusi-solusi terhadap permasalahan pembangunan ekonomi daerah terutama dalam menjalin upaya-upaya kerjasama antar daerah dalam lingkup Klaster pariwisata Selo-Sawangan.*

*Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan komparatif kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan fenomena pengembangan pariwisata di wilayah studi secara sistematis, faktual dan akurat. Sedangkan, metode komparatif digunakan untuk mengkomparasikan peran FCSS dalam pengembangan Klaster Pariwisata Selo-Sawangan dengan implementasinya melalui persepsi para stakeholder terkait dalam lingkup Klaster Pariwisata Selo-Sawangan.*

*FCSS sebagai forum lintas pelaku klaster di masing-masing tingkatan memiliki peranan yang cukup nyata dalam upaya perwujudan langkah-langkah kerjasama antar daerah terutama Kab. Boyolali dan Kab. Magelang. Dengan adanya kerjasama, masing-masing pihak akan memelihara keberlanjutan penanganan bidang-bidang yang dikerjakasikan. Selain itu kerjasama ini dapat memperkecil atau mencegah konflik dan menghilangkan ego daerah yang dapat muncul terutama pada kawasan perbatasan daerah. Diharapkan melalui peran FCSS sebagai lembaga kerjasama antar daerah upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam lingkup Klaster pariwisata Selo-Sawangan dapat terwujud.*

**Kata Kunci:** forum lintas pelaku, kerjasama antar daerah, klaster pariwisata.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengembangkan wilayahnya masing-masing. Pengembangan wilayah merupakan suatu proses yang memaksimalkan potensi terbatas pada suatu wilayah yang pada akhirnya menimbulkan potensi baru di wilayah tersebut dan ini akan mengembangkan aktivitas-aktivitas baru di wilayah lainnya. Konsep pengembangan wilayah dengan memaksimalkan potensi lokal ini disebut pengembangan ekonomi lokal (Tommy Firman, 2000 dalam Agrianza, 2006). Tujuan utama dari pengembangan ekonomi lokal ini adalah menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan wilayah. Salah satu potensi lokal yang dapat dengan cepat memicu pengembangan wilayah adalah sektor pariwisata.

Penyelenggaraan kepariwisataan merupakan perangkat yang sangat penting di dalam pembangunan daerah dalam otonomi daerah sekarang ini. Artinya bahwa sektor pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dan strategis bagi pengembangan suatu daerah terlebih lagi dengan era otonomi daerah, dimana setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli suatu daerah (PAD). Pengembangan sektor pariwisata merupakan bagian kegiatan ekonomi yang multi dimensional yang tidak hanya mempunyai tujuan akhir berupa output ekonomi atau nilai finansial yang diperoleh tetapi juga menyangkut persoalan sosial, agama, budaya dan keamanan yang bahkan menjadi ruh pariwisata untuk dieksploitasi menjadi daya tarik wisata yang mempunyai daya jual tinggi. Pariwisata berkembang menjadi industri pariwisata yang melibatkan kepentingan berbagai pihak (Sphillane, 1994) yang bahkan antar daerah atau antar negara. Sehingga dalam pengembangan potensi pariwisata akan terjadi saling ketergantungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Kerjasama antar daerah adalah suatu bentuk pengaturan kerjasama yang dilakukan antar pemerintahan daerah dalam bidang-bidang yang disepakati untuk mencapai nilai efisiensi dan kualitas pelayanan yang lebih baik (Rosen, 1993). Secara teoritis, istilah kerjasama telah lama dikenal dan dikonsepsikan sebagai suatu sumber efisiensi dan kualitas pelayanan. Kerjasama juga dapat didefinisikan sebagai upaya perjanjian dengan pihak-pihak lain. Dengan kata lain, kerjasama

merupakan kegiatan untuk menghilangkan ego daerah. Dalam rangka pengembangan potensi pariwisata, pemerintah daerah dapat mengembangkan kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan yang dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama yang diatur dengan keputusan bersama. Untuk mendukung hal tersebut di atas, maka dibentuklah Klaster Usaha Pariwisata.

Klaster usaha merupakan konsentrasi geografi oleh perusahaan-perusahaan yang saling terkait dan juga berhubungan dengan institusi penunjangnya dalam fungsional tertentu yang memiliki banyak kesamaan dan bersifat saling melengkapi (Porter, 1998 dalam Andersson et al, 2004). Klaster usaha dalam pengembangannya tidak hanya fokus pada intinya saja, tetapi juga pengembangan industri terkait, industri pendukung dan jasa-jasa lainnya. Kata kunci dalam aktivitas klaster adalah adanya efisiensi kolektif dan kerja sama kegiatan (Schmitz, 2002 dalam Supratikno, 2002). Salah satu bentuk pengembangan klaster usaha pariwisata di Propinsi Jawa Tengah adalah Klaster Pariwisata Selo-Sawangan.

Kawasan Klaster Pariwisata Selo-Sawangan yaitu Kec. Selo dan Kec. Sawangan, yang merupakan kawasan wisata lembah pegunungan Merapi-Merbabu di perbatasan administrasi daerah Kab. Boyolali dan Kab. Magelang yang memiliki berbagai kesamaan dan keunikan potensi objek dan daya tarik wisata (ODTW). Klaster Pariwisata Selo-Sawangan ini dibentuk karena letak geografis yang berdekatan, selain itu juga potensi wisata yang mempunyai kemiripan yakni wisata pemandangan alam lembah pegunungan Merapi-Merbabu. Klaster ini dibentuk pada tahun 2002. Pendekatan strategi klaster usaha dalam pengembangan pariwisata akan memberikan keuntungan dalam hal pemasaran obyek-obyek wisata dan akan menciptakan efisiensi dalam penyediaan fasilitas atau pelayanan publik pendukung aktivitas pariwisata seperti ketersediaan pelayanan transportasi yang memadai, restoran, pusat souvenir atau oleh-oleh, jasa wisata, dan lain-lain yang dapat dengan mudah diakses oleh wisatawan.

Dalam mendukung aktivitas Klaster Pariwisata Selo-Sawangan terdapat forum lintas pelaku klaster. Forum lintas pelaku klaster dibentuk pada setiap tingkatan (JICA, 2004) yaitu forum lintas pelaku klaster pada tingkat propinsi / FPESD (Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Jawa Tengah), forum pada tingkat kabupaten / FEDEP (*Forum For Economic Development and Employment Promotion*) dan forum pada tingkat wilayah produksi klaster / FRK (Forum Rembug Klaster). Masing-masing tingkatan memiliki peran aktif dalam menjalin kerjasama antar stakeholder dalam lingkup wilayah klaster. Forum lintas pelaku klaster pada Klaster Pariwisata Selo-Sawangan lebih dikenal dengan sebutan FCSS yaitu Forum Klaster Pariwisata Cepogo Selo dan Sawangan.

Aktivitas diskusi forum dalam FCSS tersebut, memungkinkan bertemunya para stakeholder terkait dari unsur pemerintah masing-masing daerah dalam lingkup wilayah klaster untuk menjalin kerjasama, khususnya dalam hal pengembangan Klaster Pariwisata Selo-Sawangan. Kerjasama antar daerah ini diperlukan, mengingat tidak setiap daerah tersebut memiliki sumber daya yang memadai dan mencukupi, baik sumberdaya alam, sumberdaya finansial (modal), maupun sumberdaya manusia. Dalam hal ini peran pemerintah daerah melalui, aktivitas diskusi dalam FCSS berperan mewujudkan upaya kerjasama antar daerah tersebut. Upaya kerjasama yang dapat dilakukan terutama dalam kesepakatan program penyediaan fasilitas publik pendukung aktivitas pariwisata dalam wilayah klaster. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi Peran Forum Lintas Pelaku Klaster Pariwisata Cepogo Selo Sawangan (FCSS) sebagai lembaga kerjasama antar daerah Kab. Boyolali dan Kab. Magelang dalam mendukung kerjasama pengembangan Klaster Pariwisata Selo-Sawangan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Klaster Pariwisata Selo-Sawangan terbentuk dari gagasan pemerintah Indonesia mencanangkan tahun ekowisata 2002 pada bulan Oktober di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Latar belakang terbentuknya Klaster Pariwisata Selo-Sawangan ini merupakan respon dari pemerintah propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang untuk memperkuat jalur pariwisata SOSEBO (Solo-Selo-Botobudur). Selain itu juga karena respon pemerintah daerah, untuk lebih memfasilitasi / memaksimalkan aktivitas masyarakat di kawasan Klaster Pariwisata Selo-Sawangan tersebut.

Aktivitas pengelolaan dalam Klaster Pariwisata Selo-Sawangan mencakup dua kabupaten, yakni Kab. Boyolali dan Kab. Magelang yang secara geografis merupakan kawasan perbatasan daerah. Aktivitas dalam klaster tersebut memungkinkan terjadinya kerjasama antar daerah kedua kabupaten. Menyikapi kebijakan mengenai otonomi daerah, pengelolaan sektor pariwisata secara sendiri-sendiri oleh daerah karena alasan kewenangan dan kepentingan daerah merupakan penyekatan terhadap pengembangan objek dan daya tarik wisata (ODTW) yang justru akan mendegradasi serta memarginalkan pengembangan sektor pariwisata. Untuk itu diperlukan suatu jalinan kemitraan / kerjasama antar daerah dalam hal penyediaan fasilitas publik pendukung aktivitas pariwisata pada Klaster Pariwisata Selo-Sawangan.

Dalam mendukung hal tersebut diatas maka dibentuklah sebuah forum lintas pelaku klaster sebagai lembaga kerjasama antar daerah yang di dalamnya terdapat aktivitas diskusi yang memungkinkan bertemunya para stakeholder terkait dari unsur pemerintah masing-masing daerah dalam lingkup wilayah klaster untuk menjalin kerjasama, khususnya dalam hal pengembangan klaster. Berdasarkan penjelasan di atas maka pertanyaan penelitian yang diambil adalah bagaimana